

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulgani, Reoslan, 1959, "Pantja Sila Sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin", *Dalam Resapkan Dan Amalkan Pantjasila*, Prapantja, Djakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Advokasi, Tim dan Pembaharuan Hukum KPK, 2014, *Anotasi Delik Korupsi Dan Delik Lainnya Yang Berkaitan Dengan Delik Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
- Agustina, Shinta, dkk, 2016, *Penjelasan Hukum: Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, LeIP, Jakarta.
- Alatas, Syed Hussain, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Malian, Sobirin (penyunting), 2008, *Membangun Hukum Indonesia: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arinanto, Satya dan Triyanti, Ninuk, 2009, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Piadana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2013, *Buku 2 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- _____, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- _____, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia, Jakarta.

Bedner, Adriaan, Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum (kumpulan tulisan), Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, Yance dan Arizone (editor) 2011, *Seri Tokoh Hukum Nasional: Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Danil, H. Elwi, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Deni, Saiful, 2010, *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan Dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, Naufan Pustaka, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fitriyah, Farida, 2016, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi: Kebijakan Pengadaan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi*, Setara Press, Malang.

Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Girsang, Juniver, 2012, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Guba, Egon G. dan Lincoln, Yvonna S., “Berbagai Pradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif”, Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gunarto, Marcus Priyo, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.

Hadjon, M., dkk, 2012, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hairi, Prianter Jaya, 2013, *Problematika Hukum Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Korupsi Di Badan Usaha Miliki Negara (dalam Kajian Seputar problematika keuangan negara, aset*

negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan (penyunting: jur Udin Silalahi), P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta dan Yogyakarta.

Halim, Abdul dan Bawano, Icku Rangga, 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah (Hukum, Kerugian Negara, Dan Badan Pemeriksa Keuangan)*, Unit Penerbitan Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.

Kartanegara, Satochid, (tanpa tahun), *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.

Krisnawati, Dani, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1983, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.

Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2002, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1999, *Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia Dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas Dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerings, Martins, *Apakah Pidana Penjara Efektif*, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Editor: Agustinus Pohan, dkk.), Pustaka Larasan, Denpasar.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung.
- _____, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

_____, 2004, *Kepita Selektif Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djembatan, Jakarta.

_____, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, Mandar Maju, Bandung.

Mustofa, Muhammad, 2010, *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana.

Notonagoro, 1967, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*, Pancuran Tujuh, Jakarta.

Patiro, Yopie Morya Immanuel, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung.

Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh dan Purnomosidi, Arie, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

Purbacaraka, Purnadi dan Halim, A Ridwan, 1997, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- _____. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Remmelink, Jan, (penerjemah: Tristam P. Moeliono), 2014, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1: Teori-Teori Dasar Hukum Pidana Materiil, Judul Asli (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Maharsa, Yogyakarta.
- _____, (penerjemah: Tristam P. Moeliono), 2017, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 3 : Hukum Penitensier : Judul Asli (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Maharsa, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Ridwan, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi Dan Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1988, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo, *Suatu Tinjauan Terhadap Efektifitas Pemidanaan*, 2012, Hukum Pidana Dalam Perspektif, (Editor: Agustinus Pohan, dkk.), Pustaka Larasan, Denpasar.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indoneisa, Jakarta.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta.

- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soejadi, H.R., "Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia, Teks pengukuhan guru besar, Pidato disampaikan tanggal 7 April 2003. Lihat: Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (penyunting), 2008, *Membangun Hukum Indonesia: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekarno, *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara*, Kursus-kursus Presiden Soekarno tentang Pantja Sila di Istana Negara di Djakarta tanggal 26 Mei, 5 Djuni, 16 Djuni dan 22 Djuni dan 3 September 1958, dan Kuliah Umum pada Seminar Pantja Sila di Jogjakarta tanggal 21 Februari 1959, Jajasan Prapantja.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudjito, 2012, *Reinterpetasi Dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Hukum*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Kourpsi*, Setara Press, Malang.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun, 2007, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Sutiyoso, Bambang, 2012, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Syamsu, M. Ainul, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Tahir, Arifin, 2011, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tresna, 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara Limited, Djakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum (Algemene Leerstukken) KUH Pidana Tahun 1915 Sampai dengan Pasal 54*, Penerbit Universitas, Jakarta.
- Voorde, Jeroen ten, "Hukum Pidana Dalam Masyarakat Pluralistik", Agustinus Pohan, dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Wijaya, Nyoman, *Menerobos Badai: Biografi Intelektual Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Witanto, D.Y., 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kotrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*, Mandar Maju, Bandung.
- Wiyono, R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaprul Khan, 2016, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Kr/1973, Tanggal 16 Desember 1976.

Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Pid.Sus/2012, tanggal 15 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr/1969, Tanggal 6 Juni 1970.

Putusan Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1970, Tanggal 27 Mei 1972.

Putusan Mahkamah Agung No.1526 K/Pid.Sus/2012, tanggal 11 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Agung No.2245 K/Pid.Sus/2012, tanggal 30 September 2014.

Putusan Mahkamah Agung No.2249 K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 Februari 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1571K/Pid/1993, tanggal 18 Januari 1995.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2477K/Pid/1988, tanggal 23 Juli 1993.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275K/Pid/1983, tanggal 28 Desember 1983.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, Tanggal 8 Januari 1966.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 43 K/Kr/1973, Tanggal 23 Juli 1973.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Agung No. 246 K/Pid.Sus/2012, tanggal 30 Juni 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 90/Pid/76/Tim, Tanggal 25 Februari 1976.

D. Jurnal

Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Ade Mahmud, “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”, *TRANSPARANSI (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi)*, Vol. VI, No. 2, September 2014.

Ahmad Calam dan Sobirin, “Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal SAINTIKOM*, Vol. 4, No. 1., Januari 2008.

Ahmad Dahlan dan Santosa Irfaan, “Menggagas Negara Kesejahteraan”, *Jurnal EL-JIZYA*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2014.

Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2., Juli 2013.

Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V, No. 1, Juni 2015.

Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Januari 2002.

Bambang Sukma Wijaya, “Korupsi Komunikasi Dalam Dimensi Pesan, Media, Konteks Dan Perilaku: Sebuah Proposisi Teoretis Untuk Riset”, *Journal Communication Spectrum*, Vol. 3 No. 1, Februari-Juli 2013.

Choky R. Ramadhan, “Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni 2018.

Christiana Tri Budhayati, “Kriteria Kepentingan Umum Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi April 2012.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIs*, Volume 9. Nomor 2., Juli-Desember 2013.

Dewi Maya Benadicta Barus, “Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor: 35/PID/2012/PT.TK), *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Maret 2016.

Eddy O.S. Hiariej, “Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 3, Oktober 2006.

_____, “Membasmi Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 10, No. 51, 2005.

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014.

Fadhilah, “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif KeIndonesiaan, *Jurnal Madani*, Edisi II Nopember 2007.

Fakhruddin Arrozi, “Perbuatan Melawan Hukum Materiil menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen”, *al-Daulah (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam)*, Vol. 4, No. 01, April, 2014.

Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015.

Hwian Christianto, “Pembaharuan Makna Asas Legalitas”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun ke-39, No. 3, Juli-September 2009.

_____, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2011.

Indriyanto Seno Adji, “”Overheidsbeleid” & Asas “Materiele Wederrechtelijkheid” Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 3, April 2005.

I Wayan Suandi, “Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2010.

Lucy K.F.R. Gerungan, “Dimensi Dan Implementasi ‘Perbuatan Melawan Hukum Materiil’ Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XIX, No. 5, Oktober-Desember 2011.

- Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kanun*, No. 5, April 2010.
- Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.
- _____, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012.
- _____, “Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP”, *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 1, Februari 2013.
- Marwan Effendy, "Apakah Suatu Kebijakan Dapat Dikriminalisasi?(Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol. 2., No. 4, 2010.
- Mesdiana Purba dan Nelvita Purba, “Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Di Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Kultura*, Vol. 14, No. 1, September 2013.
- M Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11., No. 1, Januari 2011.
- M. Syawie, “Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep”, *Jurnal INFORMASI*, Vol. 19, No. 3, September-Desember 2014.
- Muryanto Amin, “Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu Ke Waktu”, *Jurnal POLITEIA*, Vol. 3, No. 2, Juli 2011.
- Novebri Krisnandaru Sasongko, “Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Etis Dilihat Dari Segi Pendekatan Hukum”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 6-3.
- Nurriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “welfare state”?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Paisol Burlian, "Hakikat Pembangunan Hukum Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Payung Pancasila Perspektif Islam", *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVII, No. 1, Januari-Juni 2014.

Putra Halomoan Hasibuan, "Proses Penemuan Hukum", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2., No. 2, Desember 2016.

Putu Sudarma Sumadi, "Sekitar Pengertian "The Living Law" dan Penanannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional", *Kerta Patrika*, Majalah Hukum Dan Masyarakat, No. 27, Tahun IX, Oktober 1983, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.

Rahardjo dan M. Haryanto, "Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Hambatannya", *Jurnal Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Oktober 2007.

Ramadan Tabiu dan Eddy O.S., Hiariej, "Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3., Juli 2006.

Ridwan, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara" *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 6.

Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, Januari 2009.

Satija, "Kepentingan Publik Dan Kualitas Pendidikan Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1, Mei 2004.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, Juli 2011.

Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016.

Seno Wibowo dan Ratna Nurhayati, "Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2005.

- Septri Yustisiani, “Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Dialogia Iuridica*, Vol. 7, No. 1, November 2015.
- Sri Rahayu, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. III, September 2014.
- Sudharmawatiningsih, “Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Respon Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi)”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2007.
- Sunarno, “Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9, No. 1., Juni 2002.
- Supriyanto, Supanto, dan Hartiwiningsih, “Redefinisi Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 2, September 2017.
- Syarifuddin Muhtamar, “Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4., No. 1, Juni 2017.
- Ulhaq, “Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Tipikor Jakarta”, *Pandecta*, Vol. 5, No. 2, Juli 2010.
- Uminah Hakim, “Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, *UNNES Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014.
- Velliana Tanaya, “Merekonstruksi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aparatur Negara Ke Dalam Gugatan Atau Tuntutan”, *Jurnal Law Review*, Vol. XII, No. 1, Juli 2012.
- Virginia N Mongi, “Hakikat Dan Prospek Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4., Agustus 2013.
- Warih Anjari, “Melawan Hukum Materiil Dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-Kasus Di Mahkamah Agung Republik Indonesia)”, *Jurnal Hukum Stastrechts*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.
- Winda Roselina Effendi, “Konsep Welfare State Di Indonesia”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 1, No. 1, April 2017.
- Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22., No. 3., Oktober 2010.

Yohanes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan keadilan Dalam Penegakan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009.

E. Karya Ilmiah

Edward O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Disertasi, *Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Surat Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia”, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.

Hendry Julian Noor, 2018, “Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi, Disertasi, *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, “Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”, Makalah, Disampaikan pada diskusi Panel dengan topik “Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban pidana”, pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, Kamis 2 Desember 2010, Hotel Grand Preanger, Bandung.

Juniver Girsang, 2010, “Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006”, Disertasi, *Program Pascasarjana Universitas Padjajaran*, Bandung.

M. Iqbal, “Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik”, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2014, Jakarta.

Ninil Eva Yustina, “Perbuatan Melawan Hukum Materiili (*Materiel Wederrechtelijkheid*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Rangkuman Tesis, *Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang*, Februari 2009.

Rikardo Simarmata, “Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum”. *Digest Law, Society & Development*, 2006.

Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 23 Agustus 2006, Jakarta.

F. Artikel

Budiman Slamet, “Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigasi”, *Widyaiswara Madya*, Pusdiklatwas BPKP.

Eddy O.S. Hiariej, “Memahami Tindak Pidana Korupsi”, *Harian Kompas*, Edisi 25 Mei 2015.

_____, “Pasal Keranjang Sampah”, *Harian Kompas*, Edisi 7 Mei 2015.
“Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan”, www.hukumonline.com, diakses pada 18 Maret 2018.

Emerson Yuntho, dkk, “Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”, *Policy Paper Indonesia Corruption Watch 2014*, Jakarta.

Hernold F. Makawimbang, “Penghitungan Dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Hubungan Dengan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Tinjauan Terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011 di Wilayah Pengadilan: Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak”.

Lilik Mulyadi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tipikor Pada Putusan MA”, *Majalah Mahkamah Agung*, No. 3, Edisi Desember, 2013.

Redaksi, “Dugaan Korupsi, Perbekel Tirtasari Diadili Ratusan Warga Datangi PN Singaraja”, *Bali Post*, Rabu 17 Februari 2010.

Romli Atmasasmita, “Politik Hukum Pidana Dalam Pembangunan Nasional”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Wicipto Setiadi, “Penyusunan Pokok Pikiran Dan Strategi Pembahasan RUU Tentang KUHP”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

G. Internet

Adami Chazawi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tidak Dihiraukan Dalam Praktik?”, *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/adamichazawi/55009bca8133112019fa7a71/putusan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 8 Juli 2019.

Bayu Hermawan, “Kelebihan Kapasitas Lapas Tahun 2018 Capai 183 Persen”, *Republika.co.id.*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/19/p7fph2354-kelebihan-kapasitas-lapas-tahun-2018-capai-183-persen>, diakses pada 9 Agustus 2018.

Berita KPK, “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/807-urgensi-pembaruan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 11 Mei 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “BPK RI Harus Berperan Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Berita Utama Situs BPK Online*, <http://www.bpk.go.id/news/bpk-ri-harus-berperan-dalam-pemberantasan-korupsi>, diakses pada 7 Juli 2019.

Jefri Sitindaon, “Penjara Di Indonesia Over Kapasitas, Beban Keuangan Negara Semakin Berat”, *tabloidrutan.com*, <https://tabloidrutan.com/penjara-di-indonesia-kapasitas-beban-keuangan-negara-semakin-berat/>, diakses pada 9 Agustus 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/dalam jaringan, <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada 9 Agustus 2018.

Kunto Wibisono, “Enam Tahanan di Lapas Dharmasraya Positif Narkoba”, *Antaranews.com*, <https://www.antaranews.com/berita/732931/enam-tahanan-di-lapas-dharmasraya-positif-narkoba>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”, *Makalah*, badilum.mahkamahagung.go.id, diakses pada 6 Mei 2019.

- Nur Habiebie, “BNN Sebut Banyak Sel Khusus Napi Narkoba Berfasilitas Mewah”, *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/news/read/3601166/bnn-sebut-banyak-sel-khusus-napi-narkoba-berfasilitas-mewah>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
- Prins David Saut, “Kalapas Singaraja Pergoki 3 Napi Pakai Sabu di Dalam Sel”, *detiknews.com*, <https://news.detik.com/berita/d-3473909/kalapas-singaraja-pergoki-3-napi-pakai-sabu-di-dalam-sel>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.
- RZK, “Mengenang Bismar: Putusan-Putusan Berona Hati Nurani”, *Hukum Online*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it55b9cc7a97870/putusan-putusan-berona-hati-nurani/>, diakses pada 8 Juli 2019.
- Transparency International Indonesia, “Corruption Perception Index 2018”, <https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/>, diakses pada 6 Mei 2019.
- Vanny El Rahman, “Polisi Sita 30 Kilogram Sabu Sindikat Internasional Dikendalikan Napi”, *idntimes.com*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/polisi-sita-30-kilogram-sabu-sindikats-internasional-dikendalikan-napi/full>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.